



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG MAHA



BERDASARKAN
ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PDAM, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx,, No. 23, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu,
Kabupaten Kutai Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxxx,, tanggal 01 Januari 2005;

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di
rumah kontrakan di Samarinda selama 5 tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai
seorang anak bernama : xxxxxxxxxxx,, umur 7 tahun, sekarang diasuh
oleh penggugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun
dan harmonis namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga penggugat
dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Tergugat tidak suka dengan anak bawaan penggugat,
karena ketidak sukaan tergugat, tergugat sering menyakiti fisik
anak tersebut, kemudian tergugat juga pernah mengurung anak
bawaan penggugat tersebut dikamar mandi;

b. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang penggugat
tidak mengetahui namanya, tergugat sering berkomunikasi
melalui handphone seluler dengan wanita tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat terjadi pada Juni 2011, yang disebabkan
tergugat tidak berubah masih saja sering menyakiti fisik anak bawaan
penggugat dan masih saja menjalin komunikasi dengan perempuan
selingkuhan tersebut diatas (posita 4);

6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak
Juni 2016 sampai sekarang;

7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha
mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxx,);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 31 Januari 2018, untuk persidangan tanggal 07 Februari 2018, dan panggilan pada tanggal 20 Februari 2018, untuk persidangan pada tanggal 14 Maret 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penasihat tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : xxxxxxxxxxxx,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 1 Januari 2005, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx,, umur 64 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung penggugat, saksi mengenal tergugat bernama xxxxxxxxxxxx,;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat kemudian pindah ke Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah di karuniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx,;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2010 tidak rukun

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



dan harmonis lagi, sering terjadi pertengakran dan percekcoan;

- Bahwa penyebab pertengakran dan percekcoan antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat bersikap kasar terhadap anak bawaan penggugat, dan sering menyakiti anak tersebut, dan anak tersebut pernah dikurung dalam kamar mandi;

- Bahwa penyebab lain adalah tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sejak Juni 2016 yang lalu;

- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat, tergugat pernah datang ke kediaman bersama namun hanya untuk menjenguk anaknya saja;

- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx,, umur 65 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung penggugat, saksi mengenal tergugat bernama Hambali, suami dari penggugat;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat kemudian pindah ke Samarinda selama 5 tahun;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah di karuniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx,;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengakran dan percekcoan;

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat bersikap kasar terhadap anak bawaan penggugat, dan sering menyakiti anak tersebut, dan anak tersebut pernah dikurung dalam kamar mandi, tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat, tergugat pernah datang ke kediaman bersama namun hanya untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2004, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx,, maka berdasarkan alasan tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan, karena tergugat tidak suka dengan anak bawaan penggugat, dan tergugat suka menyakiti fisik dan mengurung anak bawaan penggugat tersebut dalam kamar mandi, tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak Juni 2016 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx,, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx,, pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi ibu kandung penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2010, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan karena tergugat menyakiti anak bawaan penggugat, dan tergugat pernah mengurung anak tersebut dalam kamar mandi, tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, sejak Juni 2016 yang lalu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, usaha damai telah diusahakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi ke dua yang bernama xxxxxxxxxxxx,, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi ayah kandung penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sekitar tahun 2010, sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, disebabkan tergugat kasar terhadap anak bawaan penggugat, tergugat juga menyakiti anak tersebut, dan sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, mengaku mempunyai hubungan kekeluarga dengan pemohon, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara **a quo**, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas **lex specialis derogate lex generalis**, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2004, dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2010, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
3. Bahwa, puncaknya pada Juni 2016 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah pernah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setelah kedua menikah, dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat sejak Juni 2016 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

عقلا يضاؤلا مراء قلط اهجوزا ةجوزا ةبغر مدء دتشا
إذا

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa **talak satu ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu ba'in shugra** tergugat (xxxxxxxxxxxx,) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxx,);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 601.000,00,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami A. Rukip, S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI.,

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing– masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. H. M. Riduan, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

DRS. H. M. RIDUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	160.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000,00
5.	Biaya Delegasi	Rp	200.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
7.	Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No.
0013/Pdt.G/2018/PA.Sgta